

ABRI di Tengah Paradoks Sosial

Suryo Adi Pramono *)

Abstract

Since the Indonesian Army successfully has increased nation-state economic and welfare level (hand in hand with technocrats and foreign capitals), it has to face a new challenge, that is "discontinuity track". This has been remarked by two social paradoxes: (1) global competitions that have expressed in several humanity issues (human rights, democracy, environment) in front of the existence of national development as political legitimation of the New Order rezim; (2) domestic phenomena: society's struggles in gaining autonomy space in front of centralization of power by the state through various instrumental ways. In this point, the Army has to react those challenges, not only external (toward political, economic, judicial and cultural issues) but also internal ways (self-regulation by scientific understanding and awareness of objectivity on humanity issues). Although facing a tricky real politic constellation, the Army has to answer those social paradoxes creatively and appropriately, it still wants to get political legitimation for its power domination. Finally, the main problem is how to formulate the correct answer should be done.

Pada saat "badai belum berlalu" (baca: krisis moneter dan ekonomi) kita menyaksikan sejumlah peristiwa penting di republik ini. Satu di antaranya adalah pernyataan berhenti Soeharto dari jabatan presiden yang telah diembannya sekitar 32 tahun, dan sekaligus membuka "lembaran baru" pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikannya.

*) Suryo Adi Pramono adalah staf pengajar pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan anggota *Peace and Social Justice Forum* di Surakarta.

Pada peristiwa penting pagi hari tanggal 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka tersebut, setelah B.J. Habibie menerima serah-terima jabatan presiden dari Soeharto, Menhankam/Pangab, Jenderal Wiranto membacakan sikap ABRI, yang satu di antaranya adalah mendukung B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga, dan sekaligus memberikan “sinyal” bahwa ABRI menganggap pemerintahan tersebut adalah sah, meskipun banyak ahli hukum masih berdebat tentang keabsahan pemerintahan baru itu sampai sekarang. Walaupun orang tahu, bahwa banyak petinggi ABRI tidak suka terhadap pemunculan Habibie ke puncak kekuasaan eksekutif, tetapi dengan pernyataan Wiranto tersebut, sebagai konsekuensi, ABRI mau tidak mau harus mem-*back up* pemerintahan baru tersebut. Pada posisi sulit demikian ABRI harus menentukan peran apakah yang akan dilakukannya, terutama mengingat posisi sentral yang dimilikinya, justru ketika Habibie tidak cukup banyak mendapatkan legitimasi politik berbagai pihak.

Kemudian, berkaitan dengan hal di atas: apakah yang akan dilakukan oleh ABRI selanjutnya di era reformasi ini? Pertanyaan ini menjadi urgen terutama melihat posisi sentral ABRI dalam menstabilisir dan mendinamisir arus reformasi yang berhembus di berbagai tempat. Hal itu lebih-lebih lagi harus segera dijawab, mengingat sejumlah persoalan yang bertautan dengan isu demokratisasi, HAM, kemanusiaan, orang hilang, penjarahan, perkosaan, separasi wilayah, kasus 27 Juli 1996, bahkan “perpecahan internal” di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri. Ketepatan ABRI dalam menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, kendatipun tidak selalu secara langsung (mengingat kompetensi yang dimiliki), sangat menentukan citra, kredibilitas, legitimasi dan signifikansi peran hankam dan sospol ABRI (baca: Dwi Fungsi) selama ini di hadapan masyarakat yang semakin terdidik oleh apa yang ia tahu secara langsung berkat berbagai peristiwa serta pengetahuan secara tidak langsung melalui pemberitaan media massa tentang perkembangan politik dan kenegaraan kita. Dengan demikian, “manipulasi” dan “penggelapan fakta” tidak lagi dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun dengan berbagai dalih yang disampaikan, terutama untuk melepaskan diri dari sorotan perhatian masyarakat. Pada titik inilah, jati diri ABRI di era reformasi menemukan ujiannya: masihkah ia secara konkret berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menanggapi tantangan sejarah inilah, dan terutama menyikapi era reformasi yang tengah bergulir di mana-mana, kiranya pengkajian ulang peran ABRI di republik ini perlu diselenggarakan, terutama dengan maksud

pertama-tama bukan untuk melakukan marginalisasi kekuatan ABRI sebagai kekuatan sosial-politik melainkan mencermati konstelasi mutakhir perjalanan negara-bangsa ini di tengah tantangan global secara jujur, kemudian baru menentukan posisi ABRI di dalamnya secara tepat. Kassospol ABRI, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono pun telah melontarkan sinyal mengenai kemungkinan perumusan ulang secara kontekstual tentang Dwi Fungsi ABRI.¹

Tulisan ini mengupas hal di atas secara garis-besar: (1) proses kemunculan ABRI ke posisi sentral perpolitikan Indonesia secara dominan; (2) dinamika bangsa Indonesia di hadapan perkembangan dunia yang bergerak secara diskontinyu, bahkan paradoksal²; dan (3) apakah solusi alternatif yang ditawarkan bagi ABRI di masa datang agar tetap mempunyai peran yang semakin relevan dengan tantangan jaman yang baru sama sekali, terutama apabila diperbandingkan dengan konteks kelahiran serta peran pertamanya tatkala naik ke panggung sosial-politik pada pertengahan tahun 1960-an. Atas dasar penulisan semacam inilah, pokok-pokok gagasan yang dilontarkan akan mencoba secara kritis melihat kembali dan mencari posisi yang tepat bagi ABRI di masa datang. Tentu, tulisan pendek ini akan jauh dari detail pengungkapan yang memadai, selain bersifat tentatif, oleh sebab itu ia menawarkan diri sebagai tulisan awal yang siap untuk memperoleh masukan dan kritik dari kawan-kawan yang mempunyai keprihatinan yang sama.

DOMINASI

Gejolak politik pada pertengahan tahun 1965 yang melibatkan sejumlah faksi dan aliansi politik nasional di dalam konteks menguatnya penetrasi politik negara adidaya pada era Perang Dingin telah mengantarkan ABRI (baca: Angkatan Darat) — yang sebelumnya dalam waktu yang lama berada di “pinggir panggung” kekuasaan yang didominasi oleh kaum sipil³ — tampil ke puncak kekuasaan negara melalui proses marginalisasi dominasi kekuatan

¹ *KOMPAS*, 26 Mei 1998, halaman 1.

² Penulis banyak berhutang gagasan pada DR J. Nasikun mengenai eksplanasi diskontinuitas sejarah dan paradoks sosial (yang nanti akan diuraikan di halaman 8 dan 9).

³ Uraian cukup netral tentang hal ini dari pandangan seorang militer kiranya dapat dibaca pada: T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.

“kiri” (komunis dan simpatisannya) dan Soekarno secara bertahap sampai akhir dasawarsa 60-an, paling sedikit seperti dikemukakan oleh Harold Crouch⁴ dan Leo Suryadinata⁵. Sebagaimana lazim terjadi pada pergantian tampuk kekuasaan di belahan dunia manapun, keberhasilan itu juga mengharuskan ABRI untuk mencari basis dukungan dan legitimasi politik setidaknya di dalam dua bentuk berikut⁶: (1) basis ideologi yang dirumuskan dengan konsep Dwi Fungsi ABRI yang diklaim mempunyai basis konseptual-historis pada kerjasama ABRI dan rakyat selama perjuangan kemerdekaan dan revolusi fisik, dan (2) alternatif kebijakan berupa “ekonomi sebagai panglima” yang menggantikan “politik sebagai panglima” di Era Politik Konfrontasi Soekarno sebagai konsekuensi logis dari diadopsinya developmentalisme yang mengkaitkan secara erat Indonesia dengan Blok Barat (baca: terutama Amerika Serikat) dan Jepang paling tidak dalam wujud pinjaman modal dan teknologi (IGGI, yang lantas berubah menjadi CGI, di samping IMF dan Bank Dunia), di samping kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk.

Bersamaan dengan perubahan orientasi politik luar negeri yang lebih akomodatif terhadap Barat (antara lain ditandai dengan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota PBB) dan negara tetangga (yang kemudian berujung pada pembentukan ASEAN), implementasi kebijakan “Reformasi Nanti”⁷ yang dilakukan terutama melalui sentralisasi kekuasaan negara telah mengantarkan posisi politik ABRI (yang didukung oleh para teknokrat didikan Barat dan para eksponen Angkatan 66) semakin kuat, yang kemudian dilegitimasi oleh kemenangan “mesin politik”nya (Golongan Karya) pada setiap Pemilihan Umum sejak tahun 1971 sampai sekarang (yang pelaksanaannya masih diwarnai oleh beraneka-ragam kecurangan terutama

⁴ Lihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.

⁵ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995. Kekritisan dan rincian uraian di dalam buku ini sempat membuat seorang “vokalis” Fraksi ABRI Brigjend (Pol) Roekmini Astuti (almh.) mengatakan, bahwa buku ini perlu dipertimbangkan untuk dilarang beredar, di dalam tulisannya di sebuah media massa.

⁶ Uraian ini bersumber pada Mohtar Mas'od, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, Jakarta, LP3ES, 1989, halaman 132-138.

⁷ Uraian ini didasarkan pada: Mohtar Mas'od, *Ibid.*, 1989, halaman 138.

oleh aparat keamanan dan birokrasi seperti yang diungkapkan secara statistik oleh Alexander Irwan dan Edriana⁸). Instrumentasi produk-produk hukum (antara lain “fusi partai” 1973, paket UU Politik 1985, “penelitian khusus”, “recalling”, “asas tunggal”, serta “massa mengambang”) dan pelembagaan politik⁹ (“kokarmendagri”, “korpri”, “mono-loyalitas”, dan beragam penunggalan organisasi sosial berskala nasional) meskipun secara substansial seringkali bertentangan dengan UUD 1945 namun karena dikukuhkan oleh pemegang otoritas yuridis-formal dan kekuasaan negara, maka kesemuanya itu seakan-akan merupakan aturan derivatif atas dasar penafsiran dan perumusan yang benar dari aturan perundangan di atasnya, yang berkulminasi pada Pancasila dan UUD 1945 (meskipun mengenai yang terakhir inipun, menurut Marsilam Simanjuntak¹⁰, secara konseptual-historis masih bersifat problematis).

Dominasi kekuasaan politik ABRI tersebut tercermin pada penguasaan jabatan penting pengelolaan negara ke dalam “genggaman tangan”nya. J. Kristiadi menunjukkan hal ini dengan mencermati proporsi anggota ABRI dalam kabinet dan jabatan gubernur¹¹. Anggota ABRI yang sekarang ini berkisar sekitar 300.000 personil (angka ini masih perlu dikonfirmasi) telah menduduki: 29,629 % jabatan pada Kabinet Pembangunan I; 23, 076 % jabatan Kabinet Pembangunan II; 41,176% jabatan Kabinet Pembangunan III; 9,756% jabatan

⁸ Tulisan atas dasar data statistik kecurangan dapat dilihat lebih dalam pada: Alexander Irwan dan Edriana, *Pelanggaran Pemilu 1992*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993.

⁹ Konsep politik ini berasal dari gagasan Samuel P. Huntington, seorang profesor politik dari universitas terkenal di Amerika Serikat, yaitu Harvard University, yang terkenal kembali karena buku kontroversialnya *The Clash of Civilization*. Pelembagaan politik dimaksudkan sebagai saluran aspirasi politik rakyat yang diprediksikan akan semakin menguat dan mencari saluran ke arah pembuat kebijakan setelah suatu negara berkembang berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan warganya dengan peran negara yang besar dan kuat. Agar tidak terjadi “pembusukan politik” (*political decay*) maka perlu dibuat pelembagaan politik sebagai instrumen demokrasi, sehingga artikulasi politik dapat dimasukkan ke dalam “ruang dialog” (meminjam istilah Jurgen Habermas, seorang pewaris dan pengembang Teori Kritis dari Jerman) untuk diproses menjadi kebijakan publik. Pada implementasinya, Orde Baru menempatkan pelembagaan politik justru berkebalikan dari gagasan Huntington tersebut, yaitu dalam artian “korporatisme negara” menurut Schmitter, yaitu penunggalan organisasi berlingkup nasional agar mengabdikan pada tujuan dan kepentingan yang secara sepihak diformulasikan oleh negara (baca: pemerintah).

¹⁰ Baca: Marsillam Simanjuntak, *Negara Integralistik*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.

¹¹ Lihat J. Kristiadi, “Peranan ABRI”, dalam J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, CSIS, 1996, halaman 103.

Kabinet Pembangunan IV; 9,523% jabatan Kabinet Pembangunan V; 9,523% jabatan Kabinet Pembangunan VI, dan dalam jumlah lebih kecil pada Kabinet Pembangunan VII. Sedangkan proporsi ABRI pada jabatan Gubernur/KDH cukup besar terutama pada Pelita I sampai V: 73,076% pada Pelita I; 76,923% pada Pelita II; 59,259% pada Pelita III; 51,851% pada Pelita IV dan 44,444% pada Pelita V. Meskipun tidak meliputi semua bidang politik (dan ekonomi), namun data tersebut paling tidak telah menunjukkan, bahwa pengelolaan pemerintahan negara kita didominasi oleh peran ABRI secara cukup besar. Bila kita cermati lebih lanjut, peran ABRI tersebut (baik ABRI aktif maupun purnawirawan) terlihat semakin turun secara kuantitas, meskipun secara kualitas kita masih harus jujur mengakui, bahwa peran mereka masih tetap dominan, terutama melalui pos-pos jabatan strategis yang dikuasai. Namun, menurut MacDougall¹², distribusi para pejabat militer dalam birokrasi, paling tidak menurut data tahun 1986, terkategori meluas dan dominan, dengan rentang persentase 12% (Pekerjaan Umum) sampai dengan 100% (Hankam) di dalam 17 departemen, mulai jabatan Menko, Menteri, Menteri Muda, Sekjen, Irjen, sampai dengan Dirjen. Kita belum mencermati efek pengaruh mereka pada tingkat yang paling rendah, terutama desa dan dusun, melalui aparat sipil yang berada di bawah dominasi mereka, baik langsung maupun tidak langsung.

Di tengah posisi dominan yang selama ini dipegang, sejumlah mantan perwira tinggi ABRI yang berpandangan kritis dan jauh ke depan (misalnya A.H. Nasution¹³, Kemal Idris, Soemitro, dan Rudini untuk menyebut beberapa contoh) telah melontarkan refleksi kritis, bahwa peran ABRI di bidang sosial-politik telah sedemikian jauh dari yang dibayangkan semula, yang indikasinya sedemikian terang ketika SESKOAD mengadakan pertemuan para perwira tinggi dari generasi ke generasi pada pertengahan dasawarsa 90-an. Dari diskursus yang tertangkap oleh publik, agaknya sejumlah perwira tinggi militer pun mulai menyadari bahwa dominasi itu akan berdampak negatif bagi perjalanan bangsa-negara di masa datang di hadapan semakin menguatnya isu kemanusiaan yang di dalam domain politik dirumuskan dengan konsep demokratisasi, HAM dan masyarakat sipil, yang menempati posisi

¹² Baca J. Kristiadi, *Ibid.*, halaman 102.

¹³ Menurut hemat penulis, ini dimaksudkan terutama sebelum Pak Nas ditemui oleh B.J.Habibie, yang pada akhirnya berkulminasi pada penghormatan terhadapnya sebagai Jenderal Besar berbintang lima.

berkebalikan dengan perspektif ABRI (meskipun lebih bersifat posisional daripada ideologis). Karenanya, kerusuhan sosial dan kekerasan politik terutama selama tiga tahun terakhir ini seharusnya ditafsirkan sebagai imbas dari penetrasi “semangat heroisme” (yang tidak jarang dikaitkan dengan patriotisme-militer) dalam wujudnya yang negatif ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dan “kanalisasi” beraneka persoalan sosial yang belum terselesaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat di dalam konteks “himpitan” sosial-ekonomi yang semakin “menyesakkan” kehidupan sebagian tertentu masyarakat.

Berdasarkan kecenderungan itu, perjalanan dominasi ABRI di masa kini dan mendatang akan berada pada “lintasan diskontinuitas” yang berbeda dari apa yang selama ini secara linier telah dilakukan dan dialami, sehingga mengharuskan adanya sikap dan pemikiran kritis serta kreatif agar bangsa tercinta ini terhindar dari ancaman disintegratif yang mungkin muncul baik dari lingkup domestik maupun global. Pada konteks ini, ABRI dituntut untuk menempatkan paradigma dan asumsi yang digunakan diletakkan di atas pemahaman akan adanya “diskontinuitas” yang telah mengabrogasi perkembangan “kontinuitas atau linier” yang sebelumnya menjadi pijakan (yang tercermin di dalam REPELITA dan PJP).

PARADOKS SOSIAL

Lintasan diskontinuitas di atas setidaknya hadir di dalam dua paradoks berikut: (1) tantangan baru berupa persaingan global yang mewujudkan diri dalam beraneka isu kemanusiaan (HAM, demokratisasi, lingkungan dan perburuhan) di hadapan kelangsungan pembangunan nasional (yang lebih bernuansa ekonomistis sebagai produk *developmentalisme* yang dibangun di atas konsep stabilitas nasional sebagai pengendali sosial-politik) yang menjadi basis legitimasi politik Orde Baru yang didominasi oleh ABRI (dengan dukungan para teknokrat, pengusaha domestik dan modal asing), dan (2) tantangan domestik berupa otonomi masyarakat yang muncul sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan selama ini di hadapan sentralisasi kekuasaan negara melalui instrumentasi hukum, politik, ekonomi dan ideologi.

Kedua paradoks itu mengharuskan ABRI tidak lagi memberikan respon atas dasar paradigma kontinuitas sebagaimana yang dilakukan selama ini, sebaliknya memaksanya untuk secara kritis dan kreatif menemukan alternatif pendekatan dan kebijakan baru di atas paradigma diskontinuitas. Karenanya, di dalam “era integrasi global” (meminjam istilah George Soros) sekarang ini, paradigma diskontinuitas tersebut mengharuskan ABRI berpikir secara simultan pada dua tingkat: global dan domestik, yang konsekuensinya ia tidak lagi dapat mengatakan bahwa apapun yang terjadi di Indonesia harus diatasi dengan *standard* nilai Indonesia sendiri yang berbeda dan steril dari nilai-nilai di belahan bumi lain di dalam apa yang dinamakan Demokrasi Pancasila. “Relativisme kultural” macam ini, yang berupaya merelatifir kultur nilai universal dengan argumen bahwa terdapat struktur nilai lokal yang spesifik dan berbeda dari kultur di belahan dunia lain, kiranya tidak lagi dapat dipertahankan eksistensinya. Sebaliknya, kita harus secara sadar dan rendah hati mengakui, bahwa tibalah saatnya bagi kita untuk terbuka terhadap standard nilai universal tersebut. Kehidupan kita telah dilingkupi secara simultan oleh kehidupan dunia, sehingga apa yang terjadi di negara kita akan menjadi bagian perhatian dari masyarakat dunia yang lain. Kita telah menjadi bagian dari “desa buwana” dalam istilah Marshall MacLuhan. Dunia kita tidak lagi bersifat otonom dari pengaruh kekuatan-kekuatan lain di dunia, sebaliknya kesaling-tergantungan dan saling mempengaruhi telah menjadi bagian utama kehidupan global sekarang ini.

Itulah sebabnya, pada aras domestik, keterpakuan pada pembakuan kebijakan dan orientasi sosial-politik-ekonomi yang berlaku selama ini akan membawa ABRI ke dalam paling sedikit dua krisis: “krisis legitimasi” dan “krisis otoritas”, yang pada gilirannya akan membawa pula bangsa tercinta ke dalam situasi disintegratif yang berkebalikan dengan misi dan visi ABRI yang dibakukan di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai ekspresi patriotisme dan nasionalisme yang berpretensi “merengkuh” persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua krisis itu sebenarnya menghadapkan arus tuntutan otonomi masyarakat yang bersentuhan dan menyatu dengan isu kemanusiaan global yang “bertiup kencang” dari luar negeri (baca: Barat) dengan sentralisasi kekuasaan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui paling tidak instrumentasi produk hukum, korporatisasi pelembagaan politik, birokratisasi, dan dominasi kapitalisasi atas dasar hubungan “patron-klien” (istilah Yoshihara Kunio: “kapitalisme semu”, *erzats capitalism*).

Nicholas N. Kittrie memahami paradoks tersebut secara cermat, yaitu bahwa hal itu terjadi bukan saja pada level negara, melainkan pula pada berbagai bentuk institusi sosial lain seperti institusi keagamaan, sekolah, tempat kerja, bahkan keluarga. Ia menggambarkan bahwa perkembangan masyarakat akan mengarah pada tarik menarik antara otoritas pada berbagai level dengan keinginan untuk menjauh dan terlepas dari “sekapan” otoritas tersebut, yaitu otonomi, yang terjadi pada berbagai institusi sosial. Tuntutan masyarakat Aceh dan Irian Jaya kiranya mempertegas pernyataan terakhir di atas, di samping masyarakat Timor Timur yang meminta lebih daripada itu: referendum penentuan nasib sendiri.

Dinamika tegangan antara otoritas dengan otonomi tersebut secara garis besar dan kronologis dapat dipaparkan berikut ini. Kian menguatnya tuntutan otonomi masyarakat yang berorientasi pada transformasi format sistem politik yang semakin luas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan-serta yang pada realitanya tiada kunjung mendekati keberhasilan, sebaliknya telah semakin menyadarkan mereka betapa lemahnya posisi, kekuatan dan daya tawar yang dimiliki di hadapan sedemikian kokoh dominasi dan hegemoni politik ABRI di dalam wujud pemerintahan Orde Baru. Pada titik ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Surantiko (Kiai Samin) melalui gerakan Saminisme di sekitar daerah Blora-Cepu pada era kolonialisme Belanda, maka masyarakat telah mengubah arah tuntutan yang ditujukan pada sistem politik formal ke arah yang semakin menjauh, yang terekam di dalam beraneka bentuk resistensi sosial-politik seperti “golongan putih”, “boikot pemilu”, “kotak kosong”, “KIPP”, penolakan terhadap aktor politik tunjukan dan pejabat pemerintah, “media alternatif”, dan “mega bintang” untuk menunjuk beberapa contoh. Hal semacam ini bila tidak ditangani secara arif dengan mendasarkan diri pada asumsi diskontinuitas di atas, maka pemerintahan yang didominasi oleh ABRI ini akan mengalami “krisis legitimasi dan otoritas” (sebagaimana dialami oleh DPP PDI Soerjadi) di masa mendatang, persis bersamaan dengan semakin kuatnya tekanan persaingan global yang meminta perhatian lebih bila tidak ingin eksistensi bangsa dan negara menjadi “goyah” karenanya.

Namun di sisi lain, tuntutan masyarakat tersebut pada perkembangan berikut telah kembali mengubah arahnya menuju ke titik pusat kelemahan pemerintah terutama di dalam konteks krisis ekonomi dengan mengobarkan isu reformasi ekonomi dan politik. Tuntutan yang terutama disuarakan oleh

kalangan terpelajar itu menjelma ke dalam berbagai bentuk unjuk rasa, baik tanpa maupun dengan kekerasan, sebagaimana terlihat jelas pada aksi-aksi demonstrasi di berbagai kampus dengan korban fisik di kedua belah pihak. Cara terakhir ini diambil terutama karena mereka melihat, bahwa tuntutan yang dilakukan dengan cara “ketidak-patuhan” (“menjauhi kekuasaan”) dan berbagai pernyataan melalui fora akademik ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Maka perubahan dari “gerak menjauh” untuk mendapatkan otonomi menjadi “gerak mendekat secara kritis” melalui “radikalisasi massa” dipandang perlu oleh mereka untuk menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri, baik di dalam wujud peristiwa (misalnya: demonstrasi) maupun berita.

Radikalisasi berbagai aksi yang dimotori oleh mahasiswa itu ternyata telah memunculkan tanggapan militer di dalam dua bentuk: (1) tawaran dialog pada tingkat elit dan (2) represi fisik pada tingkat aparat militer lokal pada sejumlah daerah tertentu. Ini ternyata membawa dampak pada keterpecahan cara pandang para aktivis ke dalam dua kelompok secara umum: (1) kelompok moderat (menerima tawaran dialog) dan (2) kelompok radikal (menolak dialog karena merasa itu adalah bagian dari format pengkooptasian ABRI terhadap aspirasi masyarakat yang hendak diartikulasi dan diagregasikan oleh para mahasiswa tersebut, di samping pengalaman kekerasan-paksa yang begitu membekas di dalam diri mereka ketika melakukan serangkaian aksi demonstrasi beberapa waktu sebelumnya). Pada titik inilah sebenarnya proses disintegratif tengah secara perlahan-lahan “menggantung” integrasi sosial yang selama ini menjadi komitmen ABRI menurut perspektif subyektifnya sendiri.

Bila fenomena di atas kita letakkan pada konteks kekinian, yaitu pada saat negara tercinta sedang dilanda bukan hanya krisis moneter akan tetapi juga krisis ekonomi seperti kita alami sekarang ini, kiranya ABRI semakin pula dituntut untuk melakukan tindakan reformatif yang paling tepat guna memperbaiki situasi, sebagaimana yang telah ditunggu oleh banyak pihak, terutama masyarakat kebanyakan yang semakin menderita tekanan inflasi harga sembilan bahan pokok (“sembako”) dan masyarakat terpelajar yang menuntut reformasi (bukan revolusi!) politik dan ekonomi. Kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh bila hal di atas diagendakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semakin banyak unsur kekuatan masyarakat, baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan.

Oleh karena itu, usulan dialog yang pernah disampaikan oleh Panglima ABRI (yang sekarang sekaligus menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan) Jenderal Wiranto sebelum jatuhnya Soeharto dari kursi presiden kiranya perlu disambut baik oleh berbagai pihak, untuk dijadikan salah satu alternatif cara penyelesaian masalah kemasyarakatan, dan sekaligus mengabrogasi pola represi yuridis dan kekerasan yang pernah lama diterapkan di republik ini. Namun tentu saja, pertemuan itu bukanlah pertama-tama dimaksudkan sebagai wahana pengkooptasian pendapat kritis di luar struktur resmi pemerintahan (sebagaimana pemerintah Orde Baru telah memperlakukan “pelebagaan politik” Huntington dalam artian “korporatisme negara” Schmitter), melainkan lebih sebagai kerjasama seluruh kakuatan nasional yang ada demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara, termasuk kemungkinan adanya program reformasi politik, ekonomi, dan budaya. Menurut hemat saya, pada proses inilah peran ABRI sebagai dinamisator, yang selama ini selalu diucapkan dalam berbagai peristiwa penting sebagai pasangan peran stabilisator, benar-benar akan dinantikan dan diuji kebenarannya oleh publik. Pernyataan Wiranto, bahwa ABRI bersikap pro-perubahan (reformasi), meskipun dengan bingkai: konstitusional dan gradual, kiranya semakin banyak ditunggu pula realisasinya oleh masyarakat luas, yang akan semakin mengafirmasi perannya sebagai dinamisator.

Namun harapan itu masih harus diletakkan pada kemampuan ABRI, terutama Angkatan Darat, dalam menyelesaikan perpecahan internal yang dihadapi: penyelesaian kasus Prabowo Subianto dkk., bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai ke persidangan Mahkamah Militer dan Pengadilan Umum bagi kurban-kurban kekerasan lain bila ada bukti tindak pidana yang cukup kuat. Tentu saja, penjatuhan sanksi administratif terhadap Prabowo, Muchdi dan Chairawan bukanlah penyelesaian akhir. Namun, bagaimanapun juga harus dimengerti, bahwa selain meminta banyak energi, perhatian dan biaya, kasus tersebut juga membawa ABRI pada posisi sulit: Menjaga nama baik korps yang berarti harus tidak sepenuhnya memberikan transparansi kepada masyarakat yang juga menerima dampak negatifnya, atautkah terbuka apa adanya dengan mau menanggung *stereotype* tertentu yang memandang ABRI untuk sementara waktu tidak lagi berjalan di atas rel Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tetapi dalam jangka panjang ia akan menjadi pihak yang dipercaya oleh rakyat yang telah “melahirkannya”. Hal lain adalah berkenaan dengan kesulitan finansial guna membiayai keseluruhan aktivitas korps, yang

sebelumnya di antara mereka pernah menerima “pemanjaan” fasilitas melalui tangan kelompok Prabowo. Oleh karena itu, kompleksitas tersebut akan sangat menentukan peran apa yang hendak dilakukan oleh ABRI pada saat ini dan mendatang.

SOLUSI ALTERNATIF

Dari sekian alternatif yang mungkin dirumuskan, paling tidak hasil diskursus para eksponen Orde Baru¹⁴, baik sipil maupun militer, pernah sampai pada sebuah alternatif yang kiranya sekarang menjadi urgen untuk dipelajari sebagai langkah alternatif dalam menghadapi tantangan diskontinuitas di atas. Alternatif itu setelah dimodifikasi secara umum meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) netralitas ABRI dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan negara, (2) tanpa “menutup mata” akan keberadaannya sebagai kekuatan politik riil, ABRI diberi sejumlah kursi di MPR (tidak di DPR) agar memperoleh kesempatan berperan-serta dalam menentukan arah kebijakan politik umum yang dirumuskan di dalam GBHN, (3) proses reformasi politik (baca: demokratisasi) dilakukan sesegera mungkin seiring dengan dipacunya proses pembangunan ekonomi dengan memberikan peluang yang semakin luas kepada masyarakat dalam berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam pengambilan keputusan, melalui lembaga-lembaga politik, baik infra maupun supra-struktur politik, secara bebas (tidak melalui pelembagaan politik yang telah dikorporatisasi oleh negara), meskipun tetap di dalam kerangka stabilitas politik yang selama ini diperjuangkan oleh ABRI.

Upaya demokratisasi yang tertera pada poin (3) di atas diterapkan pada dua aras: infra-struktur dan supra-struktur politik. Pada aras infra-struktur politik, upaya tersebut kiranya diarahkan paling tidak pada beberapa hal berikut: penghapusan kebijakan “massa mengambang” (*floating mass*); pemberian kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat (baik dalam bentuk ormas maupun orpol); kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan informasi; pemberdayaan organisasi sosial dan politik;

¹⁴ Uraian lengkap lihat: Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik*, Jakarta, LP3ES, 1989, halaman 138.

penghapusan “korporatisasi” atas pelembagaan politik; jaminan kebebasan untuk memilih afiliasi politik; serta peniadaan segala perekayasaan politik baik personal, posisional, organisasional, yuridis-formal, maupun relasi antar organisasi.

Pada aras supra-struktur politik, upaya tersebut mengarah pada: pemberdayaan MPR dan DPR; otonomi dan fungsionalisasi lembaga yudikatif; pembatasan dan kontrol terhadap peran dominatif lembaga eksekutif (melalui: *legislative review*, *anticipatory judicial review*, *administrative trial*¹⁵); netralitas birokrasi; serta reformasi aturan yuridis yang membelunggu peran supra-struktur politik. Bila harus jujur, reformasi kelembagaan tersebut kiranya tepat bila diawali dengan reformulasi terhadap pasal-pasal konstitusi yang memberikan kemungkinan terhadap dominasi lembaga eksekutif dalam pemerintahan dengan melakukan sejumlah amandemen terhadapnya. Di dalam proses inilah, optimalisasi peran MPR dalam mengkaji ulang konstitusi agar semakin relevan dan kontekstual semakin dinantikan oleh masyarakat luas sebagai perwujudan demokratisasi politik.

Mengikuti tesis Samuel Huntington, bahwa kesadaran politik akan mengikuti keberhasilan pembangunan ekonomi, maka di bidang politik langkah alternatif di atas selayaknya dilakukan dengan proses pelembagaan politik “dari bawah” sesuai dengan aspirasi politik masyarakat. Namun, bagaimanapun juga agar tidak terjadi kekacauan politik, masa transisional tersebut harus dijaga oleh adanya pemerintahan yang kuat dan efektif yang mempunyai peran paling sedikit sebagai berikut: (1) sebagai operator kemajuan ekonomi dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, (2) mempersiapkan masyarakat ke arah tatanan demokratis melalui pemberian kesempatan seluas mungkin bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, sehingga hasil-hasil ekonomi yang dicapai akan dapat didistribusikan secara cukup memadai melalui proses politik yang demokratis itu demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. [Kita menyaksikan betapa proses politik yang sentralistis telah mengakibatkan ketimpangan sosial-ekonomi, baik secara vertikal (adanya kelas atas, menengah dan bawah yang demikian senjang hubungannya) maupun horisontal (misalnya kesenjangan distribusi pembangunan ekonomi antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, lebih ironis, misalnya,

¹⁵ Uraian lebih detil tentang termonologi yuridis ini dapat di baca pada tulisan M. Fajrul Falaakh, *UNISIA*, No. 36/XXI/IV/1998, halaman 33-35.

Irian Jaya dan Kalimantan adalah dua wilayah penyumbang pemasukan keuangan negara yang demikian besar tetapi menerima distribusi ekonomi yang tidak sebanding)].

Secara internal, pendidikan dan pewarisan nilai yang dilembagakan di dalam berbagai bentuk, mulai dari Akademi Militer, WAMIL, MILSUK, sampai dengan SESKOAD (AL dan AU) serta SESKOGAB, perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman yang bergulir secara “diskontinyu”. Oleh karena itu, bobot militerisme secara *hardware* (perangkat keras: kekuatan senjata dan fisik) perlu diimbangi secara sangat berarti dengan muatan *software* (perangkat lunak: ilmu pengetahuan, baik abstrak-konseptual maupun aplikatif; komitmen nilai-nilai demokrasi; HAM dan keadilan). Ini menjadi begitu penting, karena di abad mendatang dapat dipastikan bahwa ancaman dari luar negeri secara militer sangat minimal, untuk tidak mengatakan tidak ada, sehingga tuntutan domestik yang berkaitan dengan demokratisasi, HAM dan keadilanlah yang akan mengemuka untuk disambut oleh ABRI, yang dalam hemat saya ketika mencermati fenomena sosial belakangan ini telah membuktikan, bahwa ABRI sangat sulit mengimbangi kemampuan pihak sipil. Tidak jarang, ABRI telah tergelincir ke dalam “jalan kekerasan” yang melanggar HAM, yang banyak meminta perhatian baik masyarakat domestik maupun internasional, yang berujung pada turunnya citra ABRI sebagai kelompok yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti pada republik ini. Ini semakin menjadi tengara yang demikian jelas dengan adanya sinyalemen kekerasan oleh aparat keamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan “orang hilang” (yang hampir semuanya adalah aktivis pro-demokrasi, yang beberapa di antaranya telah “pulang” ke rumah masing-masing: Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahendra, dan Haryanto Taslam dan yang termasuk paling akhir adalah Andi Arief).

Dengan itu semua, kita berharap, bahwa “kekerasan jalanan” akan digantikan oleh “meja-meja dialog” untuk merumuskan solusi terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang tengah menghadang. Dan dengan demikian, semakin lengkaplah “persenjataan” ABRI dalam “perang modern” yang banyak mendasarkan diri pada penguasaan “perangkat lunak” di atas.

Pada situasi seperti di atas, ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator mempunyai peran penting dalam memainkan skenario alternatif tersebut, terutama sebagai respon positif terhadap perkembangan masyarakat yang bersifat paradoksal itu. Persoalan di balik tawaran politik alternatif itu adalah: Bagaimana ABRI mampu merefleksikan secara cermat perkembangan tantangan sosial terbaru yang kian menekan; proses regulasi diri macam apakah yang sebaiknya digulirkan agar tidak di"nina-bobok"kan oleh privilese ekonomi-politik yang selama ini dinikmatinya di hadapan tantangan paradoks sosial yang kian mendekat; sejauh mana reorientasi kepada semangat awal yang diwariskan para perintisnya, yaitu "semangat kejuangan Panglima Besar Sudirman" yang kritis terhadap kekuasaan dan sebaliknya berorientasi kerakyatan, telah dilakukan oleh jajaran ABRI; dan pertimbangan apa sajakah yang sebaiknya diperhitungkan di dalam konstelasi politik dewasa ini yang "terbentang", yang tentu tidak akan mudah bagi ABRI untuk ke luar dari "sekapan" politik praktis yang (akan) "mengundang" munculnya sedemikian banyak spekulasi dan antisipasi politik oleh banyak pihak di seputar kekuasaan negara dengan kepentingan politik mereka masing-masing. Kiranya, justru pada posisi sulit di atas, ABRI semakin ditantang untuk menentukan langkah politik yang cermat di dalam konteks diskontinuitas-paradoksal perkembangan masyarakat, yang apabila keliru dalam menentukan langkah, bukan mustahil "krisis legitimasi dan otoritas" akan "menerpa" dirinya, apalagi pada saat negara dilanda krisis ekonomi (bahkan "krisis kepercayaan", kata Pak Harto di sejumlah media massa belum lama berselang, beberapa minggu sebelum ia dipaksa "berhenti" sebagai Presiden) yang telah mengakibatkan capaian pembangunan yang sedemikian besar selama ini secara berangsur telah mengalami *set back*, di samping kemungkinan hilangnya penghargaan masyarakat akan kontribusi ABRI selama ini di dalam wujud pemerintahan Orde Baru yang dikendalikannya. Terkait dengan itu semua, pluralisme politik masyarakat yang kini kian menguat (salah satunya ditandai dengan pemunculan lebih dari 56 partai politik baru) sudah barang tentu tidak dapat dijawab dengan sentralisasi dan represi kekuasaan lagi, sehingga posisi ABRI yang seharusnya berada "di atas" semua golongan dan kelompok masyarakat menjadi tepat untuk diaplikasikan pada dataran politik riil.

Daftar Pustaka

Buku

- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Irwan, Alexander dan Edriana, *Pelanggaran Pemilu 1992*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993.
- J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, CSIS, 1996.
- Kittrie, Nicholas N., *The War Against Authority: From the Crisis of Legitimacy to a New Social Contract*, Baltimore/London, The John Hopkins University Press, 1995.
- Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1989.
- Mas' oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Simandjuntak, Marsillam, *Negara Integralistik*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.
- Simatupang, Tahi Bonar, *Laporan dari Banaran*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.

Non-Buku

- Djiwandono, J. Soedjati, "Civil-Military Relations in Indonesia: The Case of ABRI's Dual Function", paper tidak diterbitkan, November 1996.
- KOMPAS, 20 Maret 1998.
- UNISIA, No.36/XXI/IV/1998.